

**ANALISIS KINERJA RASIO KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2019**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

SHELA AYU PUTRI

2017/17133086

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA RASIO KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2019**

Nama : Shela Ayu Putri

Nim : 17133086

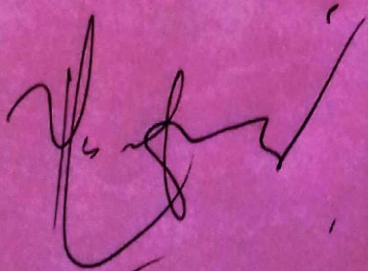
Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Padang, 05 Februari 2021

Diketahui Oleh

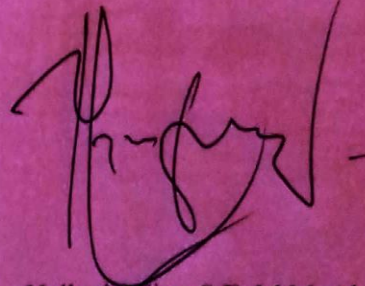
Ketua Prodi



Halkadri Fitra, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh

Pembimbing



Halkadri Fitra, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19800809 201012 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI
SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2018**

Nama : Shela Ayu Putri
Nim : 17133086
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 05 Februari 2021

Tim Penguji

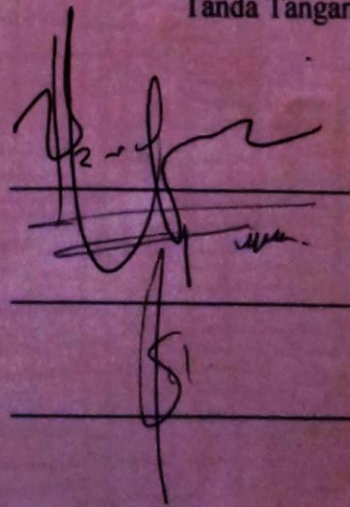
Nama

Tanda Tangan

1. Halkadri Fitra, SE, MM. Ak, CA (Ketua)

2. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak (Anggota)

3. Salma Taqwa, SE, M.Si (Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shela Ayu Putri
Tahun Masuk/ NIM : 2017/ 17133086
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Patah/ 09 Juni 1999
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Bondo No. 5, Kel. Air, Kab. Klaten Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 01 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Shela Ayu Putri

NIM. 17133086

ABSTRAK

Shela Ayu Putri : (17133086/2017). Analisis Kinerja Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE.,MM.,Ak.,CA.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, dan utang/*leverage* Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat pada periode tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu neraca pada setiap Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2015-2019 dan data tersebut diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat berdasarkan rasio keuangan, yaitu 1) Rasio likuiditas, meliputi: a) Rasio lancar dari tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 27,45 kali. b) Rasio cepat dari tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 24,62 kali. c) Rasio kas memiliki nilai rata-rata sebesar 22,56 kali. d) Rasio modal kerja terhadap total aset memiliki nilai rata-rata sebesar 0,06. 2) Rasio solvabilitas dari tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 212,65 kali. 3) Rasio utang/*leverage*, meliputi: a) Rasio utang terhadap ekuitas dari tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0105. b) Rasio utang terhadap aset modal dari tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0120.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Cepat, Rasio Kas), Rasio Solvabilitas, Rasio Utang/*Leverage* (Rasio Utang terhadap Ekuitas Dan Rasio Utang terhadap Aset Modal).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: Analisis Kinerja Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2015-2019. Tugas akhir ini salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Akuntansi dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih:

1. Kepada Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kepada Bapak Halkadri Fitra, SE.,MM.,Ak.,CA. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan selaku pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Kepada Ibu Vanica Serly, SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.
4. Kepada Bapak/ Ibu dosen selaku tim penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam Tugas Akhir ini.
5. Kepada Bapak/ Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada mak dan abak tercinta, keluarga yang senantiasa memberikan kesungguhan do'a, dukungan, motivasi serta bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Kepada Rini Rafita, Sriwila Desra dan Salsa Arunnisa serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dalam analisis dan pembahasan. Untuk itu

penulis berharap adanya masukan dan saran dari berbagai pihak untuk menjadi lebih baik lagi.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Padang, Desember 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shela Ayu Putri', with a stylized flourish at the end.

Shela Ayu Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Keuangan Daerah	11
B. Akuntansi Keuangan Daerah.....	18
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
D. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
1. Rasio Likuiditas	22
2. Rasio Solvabilitas	25
3. Rasio Utang (<i>Leverage Ratio</i>).....	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	27
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian	28
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum.....	32
B. Pembahasan.....	33
1. Analisis Rasio Likuiditas.....	33

2. Analisis Rasio Solvabilitas.....	69
3. Rasio Utang/ <i>Leverage</i>	76
BAB V_PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	5
Tabel 2.....	34
Tabel 3.....	43
Tabel 4.....	53
Tabel 5.....	62
Tabel 6.....	70
Tabel 7.....	76
Tabel 8.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retno (2013), mendefinisikan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kaas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010.

Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*), dan evaluasi kinerja.

Penggunaan analisis rasio difokuskan pada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12

(dua belas) bulan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

Penilaian untuk melihat likuid atau efesiennya suatu entitas dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yaitu menggunakan rasio keuangan (*Financial Ratio*). Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang dapat digunakan dalam pemerintahan daerah untuk menilai kinerja suatu pemerintahan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu pola hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio keuangan daerah yang dapat digunakan dalam menganalisis neraca, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang/ *leverage*.

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja (Mahmudi, 2016:109). Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Sartono, 2008:116). Likuiditas menurut Subramanyam dan Wild (2012:43), bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Menurut (Mahmudi, 2016:111), Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur

kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. International Monetary Fund (2001:6) menyatakan bahwa tujuan manajemen utang pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajiban pembayarannya dipenuhi dengan biaya serendah mungkin dalam jangka menengah hingga panjang yang konsisten dengan tingkat risiko yang bijaksana. Analisis utang dengan mempergunakan rasio utang tidak hanya berguna bagi pemerintah secara intern, tetapi juga kepada pihak-pihak pemberi pinjaman dan calon pemberi pinjaman untuk mengetahui kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membayar seluruh utangnya. Utang pemerintah daerah perlu dikelola untuk menghindari risiko-risiko pailit yang tinggi dan untuk tetap dapat melakukan penyelesaian utang dengan biaya yang serendah mungkin (Parameshwari dan Asteria, 2019:332).

Sumatra Barat (disingkat sumbar) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau sumatra dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sumatra Barat adalah Provinsi yang berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beragama islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Berdasarkan data laporan keuangan 12 (dua belas) kabupaten di Sumatra Barat yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Neraca diantaranya Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan berbasiskan akrual yang mulai diterapkan pada tahun 2015 membuat penulis tertarik untuk meneliti

laporan keuangan pemerintah kabupaten tersebut dengan menganalisis laporan keuangan selama 5 (lima) periode, yaitu tahun 2015-2019. Neraca pada Laporan Keuangan Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Total Perkembangan Neraca pada Kabupaten di Sumatera Barat
Tahun 2015-2019

Nama Kabupaten	Tahun	Total Aset	Total Kewajiban	Total Ekuitas Dana
Kabupaten Lima Puluh Kota	2015	Rp1.417.964.628.700,83	Rp5.052.497.956,60	Rp1.412.912.130.744,23
	2016	Rp1.482.209.479.136,52	Rp2.478.129.526,00	Rp1.479.731.349.610,52
	2017	Rp1.500.307.414.192,95	Rp3.095.629.601,00	Rp1.497.211.784.591,95
	2018	Rp1.614.113.052.518,59	Rp3.081.320.755,00	Rp1.611.031.731.763,59
	2019	Rp1.724.913.174.765,78	Rp5.616.395.699,00	Rp1.719.296.779.066,78
Kabupaten Agam	2015	Rp1.810.456.827.947,84	Rp5.489.374.428,00	Rp1.804.967.453.519,84
	2016	Rp1.914.637.755.556,77	Rp14.391.110.841,42	Rp1.900.246.644.715,35
	2017	Rp1.895.241.067.342,76	Rp14.476.164.042,00	Rp1.880.764.903.300,76
	2018	Rp1.935.999.446.525,01	Rp16.900.401.663,78	Rp1.919.099.044.861,23
	2019	Rp2.044.621.244.972,68	Rp16.376.710.747,73	Rp2.028.244.534.224,95
Kabupaten Dhamasraya	2015	Rp1.867.848.423.388,94	Rp40.997.130.880,72	Rp1.826.851.292.508,22
	2016	Rp2.119.569.745.404,46	Rp17.745.097.191,33	Rp2.101.824.648.213,13
	2017	Rp2.239.704.586.406,88	Rp28.155.677.075,10	Rp2.211.548.909.331,78
	2018	Rp2.429.453.615.523,15	Rp20.532.747.157,88	Rp2.408.920.868.365,27
	2019	Rp2.453.074.205.588,30	Rp28.629.183.585,27	Rp2.424.445.022.003,03
Kabupaten Kepulauan Mentawai	2015	Rp1.485.756.263.116,42	Rp1.624.903.224,00	Rp1.484.131.359.892,42
	2016	Rp1.668.663.791.928,72	Rp1.632.299.994,00	Rp1.667.031.491.934,72
	2017	Rp1.412.704.597.903,15	Rp55.877.156.809,00	Rp1.356.827.441.094,15
	2018	Rp1.509.079.864.555,07	Rp17.566.669.057,00	Rp1.491.513.195.498,07
	2019	Rp1.982.154.270.964,04	Rp7.076.310.006,00	Rp1.975.077.960.958,04
Kabupaten Padang Pariaman	2015	Rp1.213.927.435.619,96	Rp5.809.333.197,00	Rp1.208.118.102.422,96
	2016	Rp1.298.842.171.022,83	Rp4.916.941.680,40	Rp1.293.925.229.342,43
	2017	Rp1.293.847.951.538,90	Rp7.462.455.392,97	Rp1.286.385.496.145,93
	2018	Rp1.230.967.601.085,29	Rp43.248.474.572,47	Rp1.187.719.126.512,82
	2019	Rp1.365.011.320.042,26	Rp34.846.686.993,07	Rp1.330.164.633.049,19
Kabupaten Pasaman	2015	Rp1.663.340.747.178,30	Rp2.253.201.366,00	Rp1.661.087.545.812,30
	2016	Rp1.812.496.843.992,89	Rp8.239.896.426,00	Rp1.804.256.947.566,89
	2017	Rp1.820.787.532.495,37	Rp23.621.034.566,00	Rp1.797.166.497.929,37
	2018	Rp1.866.283.283.056,39	Rp6.007.574.715,00	Rp1.860.275.708.341,39
	2019	Rp1.879.392.164.407,87	Rp13.675.409.388,00	Rp1.865.716.755.019,87

Lanjutan...

Kabupaten Pasaman Barat	2015	Rp1.893.123.963.667,17	Rp12.841.172.785,33	Rp1.880.282.790.881,84
	2016	Rp2.146.604.020.542,88	Rp4.727.269.169,00	Rp2.141.876.751.373,88
	2017	Rp1.875.011.786.828,30	Rp16.899.515.014,00	Rp1.858.112.271.814,30
	2018	Rp2.056.226.233.476,66	Rp15.938.613.430,81	Rp2.040.287.620.045,84
	2019	Rp2.263.430.974.784,05	Rp32.309.166.757,03	Rp2.231.121.808.027,02
Kabupaten Pesisir Selatan	2015	Rp1.909.042.677.273,85	Rp41.153.294.949,83	Rp1.867.889.382.324,02
	2016	Rp2.081.442.252.462,43	Rp72.218.574.158,34	Rp2.009.223.678.304,09
	2017	Rp1.997.168.847.561,71	Rp70.862.123.757,48	Rp1.926.306.723.804,22
	2018	Rp2.119.482.060.722,92	Rp66.837.847.630,20	Rp2.052.644.213.091,89
	2019	Rp2.309.214.735.539,21	Rp65.150.384.373,07	Rp2.244.064.351.166,14
Kabupaten Sijunjung	2015	Rp1.225.642.576.645,67	Rp8.426.509.328,00	Rp1.217.216.067.317,67
	2016	Rp1.530.929.712.428,15	Rp18.812.280.806,00	Rp1.512.117.431.622,15
	2017	Rp1.604.974.577.372,89	Rp12.020.728.094,90	Rp1.592.953.849.277,99
	2018	Rp1.681.904.631.169,28	Rp10.512.758.566,00	Rp1.671.391.872.603,28
	2019	Rp1.766.620.398.428,16	Rp9.567.791.776,78	Rp1.757.052.606.651,38
Kabupaten Solok	2015	Rp1.434.360.566.995,67	Rp3.603.617.230,49	Rp1.430.756.949.765,18
	2016	Rp1.576.779.654.243,73	Rp10.195.842.489,50	Rp1.566.583.811.754,23
	2017	Rp1.535.448.946.175,37	Rp4.669.864.721,86	Rp1.530.779.081.453,51
	2018	Rp1.698.249.570.573,29	Rp11.782.059.949,19	Rp1.686.467.510.624,10
	2019	Rp1.710.627.043.381,63	Rp5.024.821.280,18	Rp1.705.602.222.101,45
Kabupaten Solok Selatan	2015	Rp1.592.515.927.742,94	Rp4.083.165.537,00	Rp1.588.432.762.205,94
	2016	Rp1.677.234.003.881,10	Rp6.682.856.516,48	Rp1.670.551.147.364,62
	2017	Rp1.716.684.335.160,63	Rp6.459.245.421,12	Rp1.710.225.089.739,51
	2018	Rp1.802.642.385.364,33	Rp17.124.861.473,00	Rp1.785.517.523.891,33
	2019	Rp1.805.250.097.091,17	Rp21.501.016.104,75	Rp1.783.749.080.986,42
Kabupaten Tanah Datar	2015	Rp1.180.359.290.149,18	Rp5.737.892.298,00	Rp1.174.621.397.851,18
	2016	Rp1.226.234.064.490,94	Rp10.332.825.032,00	Rp1.215.901.239.458,94
	2017	Rp1.221.308.168.072,66	Rp17.900.041.117,43	Rp1.203.408.126.955,23
	2018	Rp1.254.031.334.684,26	Rp23.648.331.227,33	Rp1.230.383.003.456,93
	2019	Rp1.318.662.252.968,83	Rp21.112.214.648,24	Rp1.297.550.038.320,59

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumbar (yang diolah)

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan pada Neraca Kabupaten di Sumatra Barat terutama pada aset dari tahun 2015-2019 laporan keuangan yang terdapat pada aset terjadi kenaikan yang stabil. Berbeda dengan hal nya kewajiban, dimana 50% dari Pemerintah Kabupaten di Sumatra Barat dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan, penurunan dan bahkan fluktuasi, yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam mengalami kenaikan, Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keuangan yang stabil, dan 6 (enam) Pemerintah kabupaten lainnya mengalami fluktuasi. Sedangkan ekuitas memiliki kesamaan dengan aset, tetapi terdapat satu Pemerintah kabupaten yang mengalami penurunan dan fluktuasi yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian 10 dari 12 Pemerintah Kabupaten di Sumatra Barat mengalami kenaikan yang signifikan.

Menilai suatu kinerja pemerintah daerah dari laporan keuangan tidak cukup hanya melihat dari laporan keuangan nya saja, karena jumlah dari rupiah pada laporan keuangan tersebut tidak bisa menilai baik dan buruknya laporan keuangan tersebut, tetapi dengan menggunakan analisis rasio keuangan, laporan keuangan akan terlihat lebih jelas kelikuitan nya serta dapat membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lainnya yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Susanto, 2019:82).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja pada neraca berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang (*leverage*) pada Kabupaten di Sumatra Barat, karena ketiga rasio tersebut dianggap dapat mewakili kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dari analisis yang dilakukan

terhadap laporan keuangan dapat diketahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Kinerja Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2015-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja laporan keuangan pada Kabupaten di Sumatera Barat pada Tahun 2015-2019 diukur dengan analisis rasio likuiditas?
2. Bagaimana kinerja laporan keuangan pada Kabupaten di Sumatera Barat pada Tahun 2015-2019 diukur dengan analisis rasio solvabilitas?
3. Bagaimana kinerja laporan keuangan pada Kabupaten di Sumatera Barat pada Tahun 2015-2019 diukur dengan analisis rasio utang/ *leverage*?
4. Bagaimana perbandingan kinerja antar Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2015-2019 berdasarkan analisis tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja laporan keuangan pada Kabupaten di Sumatera Barat pada Tahun 2015-2019 diukur dengan analisis rasio likuiditas?
2. Untuk menganalisis kinerja laporan keuangan pada Kabupaten di Sumatera Barat pada Tahun 2015-2019 diukur dengan analisis rasio solvabilitas?

3. Untuk menganalisis laporan keuangan pada Kabupaten di Sumatera Barat pada Tahun 2015-2019 diukur dengan analisis rasio utang/ *leverage*?
4. Untuk membandingkan kinerja antar Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2015-2019 berdasarkan analisis tersebut ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

- a. Sebagai aplikasi dan pengembangan terhadap teori-teori yang telah dipelajari diperkuliahan untuk dapat diterapkan pada permasalahan dalam dunia nyata yang berkaitan dengan masalah manajemen keuangan dan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- b. Penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap kinerja keuangan pemerintah pada Kabupaten di Sumatera Barat.

2. Bagi instansi pemerintah

hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten di Sumatera Barat terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

3. Bagi pembaca

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna dalam melakukan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta bahan rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi pemerintah daerah secara benar dan objektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2015-2019 dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang/ *leverage*, yaitu rata-rata rasio lancar sebesar 27,45 kali, rata-rata rasio cepat sebesar 24,62 kali, dan rata-rata rasio kas sebesar 22,56 kali menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat telah berada jauh di atas nilai 1,00 dapat dikategorikan sangat likuid (*over likuid*), sehingga Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat memiliki kecukupan keuangan yang lebih untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah. Dan dilihat dari rata-rata rasio modal kerja terhadap total aset sebesar 0,06 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 dikategorikan cukup baik.

Berdasarkan rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 sebesar 212,65 kali, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat dikategorikan sangat baik. Dan dilihat berdasarkan nilai rata-rata rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,0105 dan rata-rata rasio utang terhadap aset modal sebesar 0,0120 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat memiliki kemampuan dan kesempatan

menarik investor dan kreditur untuk menyalurkan dananya bagi pengembangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat.

B. Saran

1. Pengalokasian aktiva lancar serta pemanfaatannya harus lebih di optimalkan lagi karena kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat yang terus menerus dalam keadaan terlalu likuid. Kondisi ini berbahaya apabila terus dibiarkan karena menghambat aktivitas pendanaan.
2. Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat juga perlu untuk memantau dan mengevaluasi kenaikan kewajiban yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, jangan sampai terlalu tinggi dan melampaui kemampuan dalam melunasinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengundang investor luar untuk melakukan investasi yang selaras nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*. Yogyakarta: Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Faud, R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://bhaskoroperwiro.wordpress.com/2014/11/06/perbedaan-antara-pp-242005-dan-pp-712010-akuntansi-pemerintahan/> (akses tanggal februari 2021)
- <https://sumbar.bpk.go.id/> (akses Juni 2020)
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat (akses tanggal 3 September 2020)
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mamesah. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Prameshwari, V. M., & Asteria, B. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Periode Anggaran 2013-2017. *Jurnal Manajemen* , 332.